



EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN EKONOMI DALAM PRESPEKTIF KURIKULUM MERDEKA DI SMA NEGERI 2 LOLOFITU MOI

**Putra Seruan Hati Gulo¹, Arianto Lahagu², Eka Septianti Laoli³,
Wahyutra Adilman Telaumbanua⁴**

Prodi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Nias, Indonesia
e-mail: pgulo1306@gmail.com, ariantolahagu8084@gmail.com,
ekaseptiantilaoli@unias.ac.id, wahyutelaumbanua@gmail.com

Diterima: 21/08/2026; Direvisi: 06/10/2026; Diterbitkan: 21/10/2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pendidikan ekonomi berbasis Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 2 Lolofitu Moi, khususnya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pemanfaatan sumber daya pembelajaran. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan ekonomi, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis dampaknya terhadap pembelajaran ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-evaluatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi dengan informan kepala sekolah, guru ekonomi, dan lima peserta didik kelas XI. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, koding, pengelompokan tema, serta penarikan kesimpulan dan diverifikasi melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah mengarah pada pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik melalui diskusi, presentasi, tanya jawab, modul ajar, dan asesmen. Faktor pendukung meliputi dukungan sekolah, pendampingan, pelatihan guru, dan keterlibatan siswa, sedangkan penghambat meliputi keterbatasan fasilitas teknologi, akses internet, waktu, serta pemahaman pembelajaran berdiferensiasi. Implementasi tersebut berdampak pada peningkatan keaktifan, komunikasi, kerja sama, dan kemandirian siswa, meskipun belum dirasakan secara merata.

Kata Kunci: Evaluasi kebijakan pendidikan ekonomi, Kurikulum Merdeka, Implementasi kebijakan, Pembelajaran ekonomi.

ABSTRACT

This study was motivated by the suboptimal implementation of economic education policy based on the Merdeka Curriculum at SMA Negeri 2 Lolofitu Moi, particularly in differentiated learning and the utilization of learning resources. This study aimed to describe the implementation of economic education policy, identify supporting and inhibiting factors, and analyze its impact on economics learning. A qualitative approach with a descriptive-evaluative design was employed. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation involving the principal, an economics teacher, and five eleventh-grade students. Data were analyzed through reduction, presentation, coding, thematic categorization, and conclusion drawing, with findings validated through source and technique triangulation. The results indicate that policy implementation has encouraged more student-centered learning through group discussions, presentations, question-and-answer activities, teaching modules, and assessments. Supporting factors included school support, teacher mentoring and training, and student participation, while inhibiting factors involved limited technological facilities,



internet access, instructional time, and teachers' understanding of differentiated learning. The implementation contributed to increased student participation, communication, collaboration, and independence, although these impacts were not experienced equally by all students.

Keywords: Economic education policy evaluation, Merdeka Curriculum, Policy implementation, Economics learning.

PENDAHULUAN

Pendidikan ekonomi memiliki peran penting dalam membekali peserta didik dengan kemampuan memahami berbagai persoalan ekonomi yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ekonomi tidak hanya diarahkan pada penguasaan konsep, tetapi juga pada kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, memahami permasalahan ekonomi secara kontekstual, mengambil keputusan, dan mengembangkan kemandirian dalam belajar. Tuntutan tersebut semakin relevan dalam penerapan Kurikulum Merdeka yang memberikan ruang lebih luas bagi satuan pendidikan dan guru untuk mengembangkan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Kurikulum Merdeka menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran melalui pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan belajar peserta didik (Damati et al., 2024). Dengan demikian, keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran ekonomi tidak cukup dilihat dari tersedianya perangkat pembelajaran, tetapi perlu dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar diterjemahkan ke dalam praktik pembelajaran di sekolah.

Persoalan utama dalam penerapan kebijakan pendidikan terletak pada kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan praktik pelaksanaannya. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai tujuan, sekaligus mengidentifikasi faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaiannya. Evaluasi program pendidikan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pencapaian hasil, tetapi juga dengan efektivitas pelaksanaan, kesiapan pelaksana, serta berbagai kondisi yang memengaruhi keberhasilan program (Munandar et al., 2023). Dalam perspektif evaluasi kebijakan, Dunn mengemukakan sejumlah kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Dunn, 2018). Kerangka tersebut penting digunakan dalam penelitian ini karena pelaksanaan Kurikulum Merdeka perlu dinilai bukan hanya berdasarkan keberadaannya secara administratif, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi nyata sekolah.

Pada pembelajaran ekonomi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi persoalan pada tingkat pelaksanaan. Romdloni et al. (2025) menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran ekonomi telah didukung oleh perencanaan pembelajaran, tetapi penerapan pembelajaran berdiferensiasi belum optimal karena guru masih menghadapi kesulitan dalam memetakan karakteristik peserta didik dan mengembangkan variasi strategi pembelajaran. Temuan tersebut sejalan dengan Aulia dan Martono (2024) yang menemukan adanya kendala berupa keterbatasan kemampuan teknologi guru, keterbatasan pelatihan, waktu pembelajaran, serta ketidaksesuaian antara perangkat pembelajaran dan praktik pembelajaran di kelas. Sementara itu, Amal et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar peserta didik. Kamarullah et al. (2024) juga mengkaji penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran ekonomi dan menunjukkan pentingnya melihat kondisi implementasi secara empiris pada satuan pendidikan.

Persoalan implementasi juga berkaitan dengan kesiapan guru, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Rania et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran ekonomi perlu dilihat melalui rangkaian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran secara utuh. Dalam konteks evaluasi pendidikan, Eka et al. (2025) menegaskan pentingnya model evaluasi yang mampu melihat pelaksanaan Kurikulum Merdeka dari perspektif kebijakan dan kondisi pendidikan secara lebih menyeluruh. Fatmariyanti dan Fauzi (2023) juga menempatkan evaluasi kebijakan sebagai bagian penting untuk menilai kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaannya. Dengan demikian, evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran ekonomi perlu diarahkan pada proses pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak yang muncul dalam proses pembelajaran.

Konteks implementasi menjadi semakin penting ketika Kurikulum Merdeka diterapkan pada sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Saiman et al. (2025) menemukan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka di daerah 3T masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendukung dan kesiapan guru. Keterbatasan kompetensi guru juga menjadi persoalan dalam implementasi Kurikulum Merdeka, sebagaimana ditunjukkan oleh Wulandari et al. (2025). Pada aspek kepemimpinan sekolah, Yusmandi et al. (2025) menunjukkan bahwa kepala sekolah di wilayah 3T perlu menerapkan strategi kepemimpinan yang kolaboratif dan adaptif untuk menghadapi keterbatasan sumber daya. Arisandi et al. (2025) juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas guru melalui pengembangan *locus of control* dan *self-efficacy* agar guru lebih siap menghadapi tuntutan implementasi Kurikulum Merdeka.

Kajian mengenai implementasi Kurikulum Merdeka di wilayah 3T juga menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kompetensi guru, tetapi mencakup konteks sekolah secara keseluruhan. Harefa et al. (2024) menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar wilayah 3T dan menunjukkan pentingnya mempertimbangkan karakteristik daerah dalam menilai implementasi kebijakan. Sirojuddin et al. (2025) juga menunjukkan bahwa sekolah terpencil membutuhkan proses adaptasi dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Jahara et al. (2026) melalui kajian literatur mengenai strategi guru di sekolah dasar wilayah 3T memperlihatkan bahwa guru perlu mengembangkan strategi yang adaptif terhadap keterbatasan lingkungan sekolah. Sementara itu, Siwalette dan Arifin (2026) menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar daerah terpencil Maluku. Sucipto et al. (2024) juga mengidentifikasi berbagai tantangan implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang sekolah dasar. Rangkaian temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi geografis, sumber daya, kompetensi guru, kepemimpinan sekolah, dan fasilitas pembelajaran merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari evaluasi implementasi kebijakan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi Kurikulum Merdeka, masih terdapat celah penelitian yang perlu dikaji. Pertama, penelitian mengenai implementasi Kurikulum Merdeka di wilayah 3T lebih banyak berfokus pada jenjang sekolah dasar (Harefa et al., 2024; Jahara et al., 2026; Sirojuddin et al., 2025; Siwalette & Arifin, 2026; Sucipto et al., 2024), sedangkan kajian pada jenjang SMA, khususnya mata pelajaran ekonomi di wilayah 3T, masih terbatas. Kedua, penelitian pada mata pelajaran ekonomi lebih banyak membahas implementasi Kurikulum Merdeka dalam konteks sekolah tertentu tanpa secara khusus menempatkan keterbatasan wilayah 3T sebagai konteks utama evaluasi (Aulia & Martono, 2024; Amal et al., 2024; Rania et al., 2024; Romdloni et al., 2025). Ketiga, masih terbatas penelitian yang secara bersamaan mendeskripsikan proses implementasi, mengidentifikasi



faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis dampak kebijakan pendidikan ekonomi berbasis Kurikulum Merdeka dengan pendekatan kualitatif-evaluatif.

Kesenjangan tersebut relevan untuk dikaji di SMA Negeri 2 Lolofitu Moi. Berdasarkan observasi awal dan wawancara pendahuluan, penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran ekonomi telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya berjalan optimal. Guru telah berupaya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menggunakan modul ajar, serta menerapkan metode diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana, akses teknologi dan internet, serta pemahaman guru terhadap pembelajaran berdiferensiasi menjadi persoalan yang berpotensi memengaruhi kualitas implementasi kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara tuntutan normatif Kurikulum Merdeka dengan realitas pelaksanaan pembelajaran ekonomi di sekolah.

Untuk memahami kesenjangan tersebut secara lebih sistematis, penelitian ini menggunakan perspektif implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Model implementasi Edwards III menempatkan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Gulo et al., 2024). Kerangka tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan Kurikulum Merdeka dipahami dan dilaksanakan oleh sekolah dan guru, sejauh mana sumber daya tersedia, bagaimana kesiapan pelaksana, serta bagaimana dukungan organisasi sekolah terhadap pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, perspektif evaluasi kebijakan digunakan untuk memahami kualitas pelaksanaan kebijakan berdasarkan hasil dan kondisi yang ditemukan di lapangan (Dunn, 2018; Fatmariyanti & Fauzi, 2023). Penggabungan kedua perspektif tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya menggambarkan apakah kebijakan telah dilaksanakan, tetapi juga menjelaskan mengapa implementasi belum sepenuhnya optimal dan apa yang perlu diperbaiki.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap evaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan ekonomi berbasis Kurikulum Merdeka pada jenjang SMA di wilayah 3T dengan memadukan perspektif implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Penelitian ini juga menempatkan pengalaman kepala sekolah, guru ekonomi, dan peserta didik sebagai sumber data untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai proses implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak kebijakan terhadap pembelajaran ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan Kurikulum Merdeka, tetapi juga mengidentifikasi kondisi yang menyebabkan implementasi berjalan optimal pada aspek tertentu dan belum optimal pada aspek lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan ekonomi berbasis Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 2 Lolofitu Moi, (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut, dan (3) menganalisis dampak implementasi kebijakan pendidikan ekonomi berbasis Kurikulum Merdeka terhadap pembelajaran ekonomi. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi kajian evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran ekonomi serta memberikan rekomendasi praktis yang kontekstual bagi sekolah dan pemangku kebijakan dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan pendidikan ekonomi, khususnya pada sekolah yang memiliki karakteristik keterbatasan sumber daya seperti wilayah 3T.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-evaluatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan ekonomi



berdasarkan Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 2 Lolofitu Moi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap proses implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap pelaksanaan pembelajaran ekonomi. Evaluasi dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara kebijakan Kurikulum Merdeka dengan praktik pembelajaran ekonomi yang berlangsung di sekolah berdasarkan informasi dari informan, hasil pengamatan, dan dokumen pendukung.

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 2 Lolofitu Moi, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, dengan fokus pada pelaksanaan pembelajaran ekonomi pada kelas XI pada semester genap tahun ajaran 2025/2026. Informan penelitian dipilih secara *purposive* karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran ekonomi. Informan terdiri atas satu kepala sekolah, satu guru mata pelajaran ekonomi, dan lima siswa kelas XI sehingga diperoleh perspektif dari pihak pengelola sekolah, pelaksana pembelajaran, dan penerima layanan pembelajaran.

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pembelajaran ekonomi, termasuk penerapan pembelajaran berpusat pada siswa, penggunaan strategi dan media pembelajaran, keterlibatan siswa, serta pelaksanaan asesmen. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, guru ekonomi, dan siswa untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, serta perubahan atau dampak yang dirasakan dalam pembelajaran ekonomi, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui modul ajar, alur tujuan pembelajaran (ATP), perangkat asesmen, dan dokumen kebijakan sekolah yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikelompokkan, dan diberi kode berdasarkan fokus penelitian, yaitu implementasi kebijakan pendidikan ekonomi, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak kebijakan terhadap pembelajaran ekonomi. Data yang telah dikelompokkan kemudian disajikan dalam bentuk uraian dan matriks tematik untuk memudahkan identifikasi pola, hubungan antartemuan, dan kecenderungan data sebelum dilakukan penarikan kesimpulan.

Pengodean data dilakukan secara manual dengan menggunakan matriks analisis yang menghubungkan kutipan informan dengan kode, subtema, dan tema penelitian. Proses tersebut digunakan untuk memastikan bahwa temuan yang disajikan benar-benar berasal dari data lapangan dan memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Kesimpulan kemudian diverifikasi secara berulang dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga interpretasi yang dihasilkan tetap konsisten dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari kepala sekolah, guru ekonomi, dan siswa, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh pada waktu pengumpulan data yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi.

Selain triangulasi, penelitian menggunakan *member check* dengan mengonfirmasi kembali informasi atau interpretasi tertentu kepada informan agar data yang digunakan sesuai dengan maksud yang disampaikan. Proses pemeriksaan juga dilakukan melalui audit



pembimbing terhadap tahapan analisis dan interpretasi data. Seluruh informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan memberikan persetujuan untuk berpartisipasi, sedangkan identitas informan dalam penyajian data disamarkan menggunakan kode seperti I1, I2, dan I3.1–I3.5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian disusun berdasarkan tiga fokus utama, yaitu pelaksanaan kebijakan pendidikan ekonomi berdasarkan Kurikulum Merdeka, faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya, serta dampaknya terhadap proses pembelajaran ekonomi. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru ekonomi, dan lima siswa kelas XI, observasi proses pembelajaran, serta dokumentasi perangkat pembelajaran dan asesmen. Seluruh data kemudian dianalisis melalui proses reduksi, pengelompokan kode, penyajian data, serta verifikasi untuk menemukan pola temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Ekonomi Berdasarkan Kurikulum Merdeka

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Lolofitu Moi telah dilakukan melalui pembelajaran yang mulai diarahkan pada keterlibatan aktif siswa. Berdasarkan hasil wawancara, kepala sekolah menyampaikan bahwa guru telah mulai menyesuaikan pembelajaran dengan prinsip Kurikulum Merdeka melalui penyusunan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, modul ajar, dan asesmen. Sekolah juga melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.

Pada tingkat pembelajaran, guru ekonomi menerapkan beberapa strategi yang mendorong siswa untuk berpartisipasi secara langsung, terutama melalui diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, dan pemberian tugas. Guru tidak hanya menyampaikan materi secara satu arah, tetapi memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan mempresentasikan hasil pekerjaan. Media pembelajaran yang digunakan meliputi buku, papan tulis, video, dan *PowerPoint*, meskipun pemanfaatan teknologi masih dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan akses internet.

Hasil observasi menunjukkan bahwa proses pembelajaran telah memberikan ruang bagi siswa untuk terlibat dalam kegiatan belajar. Siswa terlihat mengikuti diskusi, menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Namun, penerapan pembelajaran berdiferensiasi belum berjalan secara optimal karena guru masih menghadapi keterbatasan waktu, fasilitas, dan kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa yang beragam.

Untuk memperlihatkan hubungan antara data lapangan, kode, subtema, dan tema yang ditemukan dalam proses analisis, hasil pengodean data disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengodean Data Implementasi Kebijakan Pendidikan Ekonomi

Informan	Kutipan/Temuan Utama	Kode	Subtema	Tema
I1	Guru sudah mulai menerapkan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran	Implementasi Kurikulum Merdeka	Pelaksanaan pembelajaran	Implementasi Kebijakan Pendidikan Ekonomi

Informan	Kutipan/Temuan Utama	Kode	Subtema	Tema
I1	Sekolah melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran	Supervisi pembelajaran	Pengawasan pembelajaran	Implementasi Kebijakan Pendidikan Ekonomi
I2	Pembelajaran diarahkan agar siswa lebih aktif dan berpusat pada siswa	<i>Student-centered learning</i>	Pelaksanaan pembelajaran	Implementasi Kebijakan Pendidikan Ekonomi
I2	Guru menggunakan diskusi kelompok dan presentasi	Diskusi dan presentasi	Strategi pembelajaran	Implementasi Kebijakan Pendidikan Ekonomi
I2	Guru mengalami kesulitan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi	Kesulitan pembelajaran berdiferensiasi	Hambatan pembelajaran	Faktor Penghambat
I2	Guru menggunakan video sebagai media pembelajaran	Media pembelajaran	Pemanfaatan teknologi	Faktor Pendukung
I3.1	Diskusi kelompok membuat pembelajaran lebih menarik	Pembelajaran menarik	Aktivitas belajar siswa	Dampak Pembelajaran
I3.2	Siswa lebih aktif bertanya dalam pembelajaran	Keaktifan siswa	Partisipasi siswa	Dampak Pembelajaran
I3.3	Media pembelajaran membantu siswa memahami materi	Pemahaman materi	Media pembelajaran	Dampak Pembelajaran
I3.4	Sebagian siswa masih mengalami kesulitan memahami materi	Kesulitan memahami materi	Kendala belajar siswa	Faktor Penghambat
I3.5	Fasilitas teknologi masih terbatas	Keterbatasan fasilitas	Sarana dan prasarana	Faktor Penghambat

Berdasarkan Tabel 1, implementasi kebijakan pendidikan ekonomi terlihat melalui tiga aspek utama, yaitu penyesuaian proses pembelajaran dengan prinsip Kurikulum Merdeka, penggunaan strategi yang mendorong aktivitas siswa, dan adanya supervisi dari pihak sekolah. Temuan juga menunjukkan bahwa implementasi belum sepenuhnya optimal karena pembelajaran berdiferensiasi dan pemanfaatan teknologi masih menghadapi keterbatasan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan sudah berjalan pada tingkat praktik pembelajaran, tetapi kualitas implementasinya masih dipengaruhi oleh kondisi sumber daya sekolah dan kemampuan guru dalam menyesuaikan pembelajaran dengan keragaman kebutuhan siswa.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Implementasi kebijakan pendidikan ekonomi tidak berlangsung dalam kondisi yang seragam, tetapi dipengaruhi oleh kondisi internal sekolah, guru, siswa, serta ketersediaan sarana

pendukung. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa dukungan kepala sekolah, keterlibatan guru, kesempatan mengikuti pelatihan, dan partisipasi siswa menjadi unsur yang membantu pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Sebaliknya, keterbatasan fasilitas, akses teknologi dan internet, kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, serta perbedaan kemampuan siswa menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Dari sisi kelembagaan, kepala sekolah memberikan dukungan melalui supervisi dan pemantauan pembelajaran. Guru juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pemahaman melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan, sementara kerja sama antarguru membantu dalam menghadapi tuntutan perubahan pembelajaran. Keterlibatan siswa dalam diskusi, presentasi, dan aktivitas kelompok juga menjadi faktor yang mendukung terciptanya pembelajaran yang lebih aktif.

Namun, beberapa kendala masih ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran. Keterbatasan perangkat teknologi dan akses internet membatasi variasi media pembelajaran yang dapat digunakan guru. Selain itu, guru mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena terdapat perbedaan kemampuan dan karakteristik belajar siswa, sedangkan waktu pembelajaran yang tersedia terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan prinsip Kurikulum Merdeka belum dapat dilakukan secara optimal pada seluruh siswa.

Temuan mengenai faktor pendukung dan penghambat tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan sumber data untuk memperjelas kondisi implementasi kebijakan di sekolah.

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Kebijakan dan manajemen sekolah	Dukungan kepala sekolah dan supervisi pembelajaran	Keterbatasan sumber daya sekolah
Kompetensi guru	Pelatihan, pendampingan, dan kerja sama antarguru	Kesulitan menyusun modul dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi
Proses pembelajaran	Diskusi, presentasi, tanya jawab, dan tugas	Keterbatasan waktu untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa
Teknologi dan media	Penggunaan video dan <i>PowerPoint</i>	Keterbatasan fasilitas teknologi dan akses internet
Siswa	Partisipasi dalam diskusi dan kerja kelompok	Perbedaan kemampuan, kepercayaan diri, dan pemahaman siswa

Tabel 2 menunjukkan bahwa faktor pendukung dan penghambat saling berkaitan dengan kondisi implementasi di tingkat sekolah dan kelas. Dukungan manajemen sekolah dan keterlibatan guru memberikan dasar bagi pelaksanaan kebijakan, sedangkan keterbatasan fasilitas dan variasi kemampuan siswa menjadi faktor yang membatasi optimalisasi pembelajaran. Dengan demikian, hambatan implementasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan guru, tetapi juga dengan kondisi sumber daya dan karakteristik siswa yang harus dihadapi dalam proses pembelajaran.

Dampak Implementasi Kebijakan terhadap Pembelajaran Ekonomi

Dampak implementasi kebijakan terlihat terutama pada perubahan pola interaksi dan keterlibatan siswa selama pembelajaran ekonomi. Hasil wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab membuat pembelajaran dirasakan lebih



menarik dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Penggunaan media seperti video dan *PowerPoint* juga membantu sebagian siswa memahami materi yang disampaikan.

Dari hasil observasi, keterlibatan siswa tampak melalui aktivitas bertanya, menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat, bekerja sama dalam kelompok, dan mempresentasikan hasil pekerjaan. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran tidak sepenuhnya berpusat pada guru, tetapi telah memberikan ruang kepada siswa untuk mengambil peran dalam proses pembelajaran. Meskipun demikian, peningkatan keterlibatan tersebut belum dirasakan secara merata karena masih terdapat siswa yang kurang aktif, mengalami kesulitan memahami materi, atau memiliki kepercayaan diri yang lebih rendah.

Selain keterlibatan siswa, penerapan asesmen juga menunjukkan adanya upaya menilai proses dan hasil belajar melalui tugas individu maupun kelompok, presentasi, tes harian, serta penilaian aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Namun, pelaksanaan asesmen secara komprehensif masih menghadapi keterbatasan waktu dan jumlah siswa dalam kelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak implementasi kebijakan sudah terlihat pada proses pembelajaran, tetapi penguatan pada aspek diferensiasi dan asesmen masih diperlukan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan ekonomi berdasarkan Kurikulum Merdeka telah mendorong pembelajaran yang lebih interaktif dan partisipatif. Siswa memperoleh lebih banyak kesempatan untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, bekerja sama, dan menggunakan media pembelajaran dalam memahami materi ekonomi. Namun, dampak tersebut belum sepenuhnya merata karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas, kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, perbedaan karakteristik siswa, dan keterbatasan waktu pembelajaran.

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pendidikan Ekonomi Berdasarkan Kurikulum Merdeka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan ekonomi berdasarkan Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 2 Lolofitu Moi telah berjalan pada aspek perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan asesmen, tetapi belum sepenuhnya optimal. Guru telah mulai menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa melalui diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, pemberian tugas, serta penggunaan berbagai media pembelajaran. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya terlihat dari kelengkapan perangkat pembelajaran, tetapi terutama dari perubahan praktik pembelajaran yang memberikan ruang lebih besar kepada siswa untuk terlibat dalam proses belajar.

Temuan tersebut sejalan dengan prinsip pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan ruang bagi pembelajaran yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan belajar siswa (Damiati et al., 2024). Dalam konteks pembelajaran ekonomi, pendekatan tersebut penting karena materi ekonomi tidak cukup dipahami melalui penyampaian konsep secara satu arah, tetapi perlu dikaitkan dengan persoalan kehidupan nyata, diskusi, pengambilan keputusan, dan kemampuan menyampaikan argumentasi. Dengan demikian, penggunaan diskusi dan presentasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa guru telah bergerak dari pola pembelajaran yang dominan berpusat pada guru menuju pembelajaran yang lebih partisipatif.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara arah kebijakan dengan praktik pembelajaran, khususnya pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Guru telah memahami pentingnya menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa, tetapi penerapannya belum konsisten karena keterbatasan waktu, fasilitas, dan kemampuan dalam



memetakan kebutuhan belajar siswa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap prinsip Kurikulum Merdeka belum secara otomatis menghasilkan implementasi yang optimal di kelas.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Romdloni et al. (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran ekonomi telah berjalan pada aspek perencanaan dan asesmen, tetapi pembelajaran berdiferensiasi masih menghadapi kendala, terutama dalam pemetaan karakteristik siswa dan variasi strategi pembelajaran. Aulia dan Martono (2024) juga menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran ekonomi masih menghadapi persoalan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kesiapan guru, bahan ajar, sarana prasarana, dan keterbatasan waktu. Kesamaan tersebut memperkuat bahwa persoalan utama implementasi bukan terletak pada penerimaan kebijakan oleh sekolah, melainkan pada kemampuan menerjemahkan prinsip kebijakan ke dalam praktik pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa.

Dari perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup ditentukan oleh keberadaan kebijakan dan instruksi formal, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana menerjemahkannya dalam praktik. Edwards (1980) menempatkan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai unsur penting yang memengaruhi implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, guru telah menunjukkan penerimaan terhadap kebijakan melalui perubahan strategi pembelajaran, tetapi keterbatasan sumber daya dan kondisi kelas menyebabkan implementasi belum berlangsung secara maksimal. Dengan demikian, implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 2 Lolofitu Moi dapat dikategorikan telah berjalan secara substantif, tetapi masih membutuhkan penguatan pada tahap penerapan di tingkat kelas.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Implementasi kebijakan pendidikan ekonomi di SMA Negeri 2 Lolofitu Moi didukung oleh keterlibatan kepala sekolah, guru, dan siswa. Kepala sekolah memberikan dukungan melalui supervisi dan pemantauan pembelajaran, sedangkan guru berupaya meningkatkan pemahaman melalui pelatihan, pendampingan, dan kerja sama dengan guru lain. Partisipasi siswa dalam diskusi, presentasi, dan kerja kelompok juga menjadi faktor penting karena pembelajaran yang berpusat pada siswa membutuhkan keterlibatan aktif dari peserta didik.

Dukungan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memiliki modal internal yang cukup untuk dikembangkan. Pelatihan dan pendampingan membantu guru memahami perubahan tuntutan pembelajaran, sedangkan supervisi kepala sekolah memberikan arah dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan. Aulia dan Martono (2024) juga menunjukkan pentingnya pelatihan, komunitas belajar, modifikasi modul ajar, dan kolaborasi dalam membantu guru menghadapi perubahan tuntutan Kurikulum Merdeka.

Di sisi lain, faktor penghambat yang paling menonjol adalah keterbatasan fasilitas teknologi dan akses internet, kesulitan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, keterbatasan waktu, serta perbedaan kemampuan dan karakteristik siswa. Hambatan tersebut saling berkaitan karena keterbatasan fasilitas membatasi pilihan media dan sumber belajar, sementara keterbatasan waktu menyulitkan guru memberikan perlakuan pembelajaran yang berbeda sesuai kebutuhan setiap siswa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan implementasi bukan semata-mata persoalan kompetensi individual guru, tetapi juga berkaitan dengan dukungan sistem dan lingkungan sekolah.

Temuan ini sejalan dengan Saiman et al. (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di daerah 3T masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendukung serta



kesiapan guru, sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan. Wulandari et al. (2025) juga menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi guru menjadi salah satu persoalan dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Sementara itu, Yusmandi et al. (2025) menekankan pentingnya kepemimpinan kepala sekolah dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di daerah 3T.

Konteks wilayah juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam membaca temuan penelitian ini. SMA Negeri 2 Lolofitu Moi berada pada lingkungan yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan akses teknologi, sehingga penerapan kebijakan yang menuntut fleksibilitas pembelajaran tidak dapat disamakan begitu saja dengan sekolah yang memiliki sumber daya lebih memadai. Harefa et al. (2024), Sirojuddin et al. (2025), dan Jahara et al. (2026) menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di wilayah 3T menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kesiapan guru, kondisi sekolah, sumber daya, dan kebutuhan untuk menyesuaikan strategi implementasi dengan karakteristik daerah. Oleh karena itu, penguatan implementasi di SMA Negeri 2 Lolofitu Moi perlu mempertimbangkan kondisi lokal, bukan sekadar menuntut kesesuaian administratif dengan kebijakan nasional.

Jika dilihat melalui kerangka implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat tersebut menunjukkan bahwa sumber daya menjadi salah satu titik kritis pelaksanaan kebijakan. Gulo et al. (2024) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan perlu dipahami sebagai proses menerjemahkan keputusan kebijakan ke dalam tindakan yang dapat dilaksanakan oleh pelaksana. Dalam penelitian ini, arah kebijakan telah diterima dan mulai dilaksanakan, tetapi keterbatasan sumber daya membuat sebagian tuntutan kebijakan belum dapat diwujudkan secara optimal. Karena itu, penguatan fasilitas, peningkatan kompetensi guru, pendampingan, dan supervisi perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi implementasi, bukan sekadar kegiatan tambahan.

Dampak Implementasi Kebijakan terhadap Pembelajaran Ekonomi

Implementasi Kurikulum Merdeka memberikan dampak positif terutama pada proses pembelajaran ekonomi, khususnya dalam peningkatan keterlibatan siswa. Siswa menjadi lebih banyak terlibat dalam diskusi, tanya jawab, presentasi, dan kerja kelompok, sementara penggunaan video dan *PowerPoint* membantu sebagian siswa memahami materi. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak yang paling terlihat dalam penelitian bukan semata-mata perubahan hasil belajar dalam bentuk nilai, tetapi perubahan pada proses belajar dan pola interaksi antara guru dan siswa.

Perubahan tersebut relevan dengan karakter pembelajaran Kurikulum Merdeka yang memberikan ruang bagi siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Amal et al. (2024) menunjukkan adanya hubungan penerapan Kurikulum Merdeka dengan motivasi belajar siswa pada pembelajaran ekonomi, sedangkan Kamarullah et al. (2024) menunjukkan adanya pengaruh Kurikulum Merdeka terhadap hasil belajar ekonomi. Temuan penelitian ini melengkapi hasil tersebut dari sisi kualitatif dengan menunjukkan bahwa perubahan proses pembelajaran tampak melalui meningkatnya kesempatan siswa untuk bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan bekerja sama.

Meskipun demikian, dampak implementasi belum dirasakan secara merata oleh seluruh siswa. Masih terdapat siswa yang kurang aktif, mengalami kesulitan memahami materi, atau memiliki kepercayaan diri yang lebih rendah ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran yang lebih aktif belum secara otomatis menjamin seluruh siswa memperoleh pengalaman belajar yang sama. Justru, kondisi tersebut memperkuat



kebutuhan terhadap pembelajaran berdiferensiasi agar aktivitas belajar dapat disesuaikan dengan kemampuan, karakteristik, dan kebutuhan siswa.

Temuan tersebut memperlihatkan hubungan yang kuat antara faktor penghambat dan dampak kebijakan. Keterbatasan fasilitas dan teknologi membatasi variasi pengalaman belajar, sedangkan keterbatasan penerapan diferensiasi menyebabkan sebagian siswa belum memperoleh dukungan belajar yang sesuai. Dengan demikian, dampak positif Kurikulum Merdeka pada pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Lolofitu Moi sudah terlihat pada aspek partisipasi dan interaksi belajar, tetapi belum dapat dikatakan merata pada seluruh siswa.

Hasil ini juga memperkuat temuan Romdloni et al. (2025) bahwa implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran ekonomi dapat berjalan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan, tetapi pembelajaran berdiferensiasi masih menjadi bagian yang perlu diperkuat. Aulia dan Martono (2024) menunjukkan kondisi serupa bahwa implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran ekonomi masih dipengaruhi oleh kesiapan guru, keterbatasan sarana, kemampuan teknologi, dan waktu pembelajaran. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan ekonomi perlu dilihat secara utuh, yaitu bukan hanya dari apakah Kurikulum Merdeka telah diterapkan, tetapi dari sejauh mana prinsipnya benar-benar menghasilkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

Implikasi Temuan

Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan ekonomi berdasarkan Kurikulum Merdeka merupakan proses yang dipengaruhi oleh hubungan antara kebijakan, kapasitas guru, dukungan sekolah, ketersediaan sumber daya, dan karakteristik siswa. Kebijakan dapat telah diterima secara formal oleh sekolah, tetapi kualitas implementasinya tetap ditentukan oleh kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan prinsip kebijakan ke dalam praktik pembelajaran. Temuan ini memperlihatkan bahwa konteks sekolah menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat keterlaksanaan kebijakan.

Secara praktis, sekolah perlu memperkuat pendampingan guru, terutama dalam pemetaan kebutuhan belajar siswa, penyusunan pembelajaran berdiferensiasi, pengembangan media pembelajaran, dan pelaksanaan asesmen yang lebih beragam. Kepala sekolah perlu mempertahankan supervisi dan kolaborasi guru sekaligus mendorong pemenuhan fasilitas yang paling mendukung pembelajaran ekonomi. Bagi guru, strategi pembelajaran aktif yang telah berjalan perlu dipertahankan dan dikembangkan dengan pendekatan yang lebih adaptif agar keterlibatan belajar tidak hanya muncul pada siswa yang sudah aktif, tetapi juga menjangkau siswa yang masih pasif atau mengalami kesulitan belajar.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pendidikan ekonomi berdasarkan Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 2 Lolofitu Moi telah berjalan melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa, penggunaan diskusi, tanya jawab, presentasi, penugasan, pemanfaatan media pembelajaran, serta pelaksanaan asesmen. Implementasi tersebut didukung oleh supervisi kepala sekolah, kolaborasi dan pengembangan kompetensi guru, serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan akses teknologi, keterbatasan waktu, kesulitan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, serta perbedaan kemampuan dan karakteristik siswa. Kebijakan tersebut memberikan dampak positif terutama terhadap partisipasi, interaksi, kerja sama, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran ekonomi, meskipun dampaknya belum dirasakan secara merata oleh seluruh siswa.



Implikasi penelitian menunjukkan bahwa penguatan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dengan keterbatasan sumber daya perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi guru, pendampingan pembelajaran berdiferensiasi, penguatan supervisi dan kolaborasi antarguru, serta pemenuhan fasilitas pembelajaran dan teknologi secara bertahap. Guru perlu mempertahankan strategi pembelajaran aktif sekaligus menyesuaikannya dengan kemampuan dan kebutuhan siswa agar keterlibatan belajar menjadi lebih merata. Sekolah juga perlu mengembangkan evaluasi implementasi secara berkala agar kebijakan tidak berhenti pada pemenuhan perangkat pembelajaran, tetapi benar-benar menghasilkan proses pembelajaran ekonomi yang adaptif dan sesuai dengan kondisi siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, I., Atmono, D., Hasanah, M., & Nor, B. (2024). Pengaruh penerapan Kurikulum Merdeka terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran ekonomi di Sekolah Penggerak SMAN 5 Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 12(2), 315–321. <https://doi.org/10.26740/jupe.v12n2.p315-321>
- Arisandi, D., Dike, D., & Andayani, A. (2025). Pengembangan modul implementasi Kurikulum Merdeka untuk penguatan *locus of control* dan *self efficacy* guru di wilayah 3T Kabupaten Sintang. *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 16(1), 16–31. <https://doi.org/10.31932/ve.v16i1.4518>
- Aulia, Z., & Martono, T. (2024). Evaluasi penerapan Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran ekonomi. *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*, 5(3), 724–730. <https://doi.org/10.25157/j-kip.v5i3.15796>
- Damiati, M., Junaedi, N., & Asbari, M. (2024). Prinsip pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(2), 11–16. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/922>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Eka, S. N. A., Hikmah, A. D., Mutia, R., & Mustofa, T. A. (2025). Model evaluasi pendidikan dalam Kurikulum Merdeka: Studi literatur dan perspektif kebijakan Kemendikbud. *SILABUS: Jurnal Ilmu dan Inovasi Pendidikan*, 2(2), 10–16. <https://doi.org/10.62667/silabus.v2i2.206>
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan publik versi William Dunn: Analisis dan implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1–9. <https://humasjournal.my.id/index.php/HJ/article/download/3/4>
- Gulo, T. R., Mendrofa, R., & Elazhari. (2024). Implementasi kebijakan publik serta terhadap kepentingan publik berdasarkan teori administrasi negara saat ini. *Journal Genta Mulia*, 15(1), 387–392. <https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/963>
- Harefa, M. M., Usman, H., & Lestari, I. (2024). Analysis of the implementation of the Merdeka Curriculum in 3T areas (underdeveloped, frontier, and outermost) (Elementary school in Namohalu Esiwa Sub-District). *Jurnal Elementaria Edukasia*, 7(1), 2195–2207. <https://doi.org/10.31949/jee.v7i1.8623>
- Jahara, B., Mahpudin, Haryanti, Y. D., & Yusof, M. R. (2026). Teachers' strategies for implementing the Merdeka Curriculum in elementary schools in 3T areas: A literature review. *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 15(2), 540–560. <https://doi.org/10.33578/jpfkip.v15i2.540-560>



- Kamarullah, H., Marganingsih, A., & Thoharudin, M. (2024). Pengaruh Kurikulum Merdeka Belajar terhadap hasil belajar ekonomi di MAN 1 Sintang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 9(1), 219–228. <https://doi.org/10.31932/jpe.v9i1.3358>
- Munandar, A., Nurholizah, S., Artika, D. T., Mahroja, S., Nurholizah, R., Anggraini, M., Rahmawati, I. S. N., Monika, S. A., Najwa, H., Adetya, A. F., Wiansyah, A., & Gustianda, A. (2023). Evaluasi program pendidikan: Tinjauan terhadap efektivitas dan tantangan. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 128–136. <https://doi.org/10.19109/elidare.v9i2.20229>
- Rania, D., Sazili, S., Zufiyardi, Z., Milla, H., & Ayuni, R. (2024). Analisis implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran ekonomi di SMAN 1 Bengkulu. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 3(2), 57–66. <https://doi.org/10.37676/mude.v3i2.5678>
- Riyadi, S., Munip, A., Junaidi, A., Buaja, T., Shaddiq, S., & Andriani, N. (2025). Transformasi pendidikan luar biasa di era digital: Inklusi dan teknologi di tahun 2025. *Jurnal Edu Research*, 6(1), 1211–1222. <https://www.iicls.org/index.php/jer/article/view/641>
- Romdloni, F. N., Herlindawati, D., & Mardiyana, L. O. (2025). Implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 3 Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi dan Kewirausahaan (JPEAKU)*, 5(2), 103–118. <https://doi.org/10.29407/jpeaku.v5i2.26766>
- Saiman, R., Rusdianto, & Kasman, R. (2025). Ketercapaian Kurikulum Merdeka dan kesiapan guru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3-T). *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(1), 137–152. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v10i1.5595>
- Sirojuddin, A., Kartiko, A., & Ma'arif, M. A. (2025). Adaptation of Independent Curriculum in remote elementary schools. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 9(3), 734–749. <https://doi.org/10.35723/ajie.v9i3.231>
- Siwalette, L. V., & Arifin, Z. (2026). Kesenjangan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar daerah terpencil Maluku: Analysis fidelity of implementation. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(1), 97–110. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2026.v13.i1.p97-110>
- Sucipto, S., Sukri, M., Patras, Y. E., & Novita, L. (2024). Tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar: Systematic literature review. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 12(1), 278–287. <https://doi.org/10.20961/jkc.v12i1.84353>
- Wulandari, H., Mulyasari, E., Hendriawan, D., Sugiarti, D., & Hasan Abuluruq, R. K. (2025). Keterbatasan kompetensi guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka: Studi kasus di SDN Sinding 2. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 13(1), 208–216. <https://doi.org/10.20961/jkc.v13i1.96969>
- Yusmandi, Y., Sabri, T., & Ikhsan, I. (2025). Strategi kepemimpinan kepala sekolah dasar dalam implementasi Kurikulum Merdeka daerah 3T di Kabupaten Sintang. *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 16(1), 32–46. <https://doi.org/10.31932/ve.v16i1.4520>